

## **SUSTAINABLE TOURISM SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Suatu Analisis dari sisi Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Oka A. Yoeti dan I Made Adhi Gunadi  
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

### **Abstract**

*Sustainable tourism development guidelines and management practices are applicable to all forms of tourism in all types of destinations, and all types of tourism, whether it is 'mass tourism' or 'niche tourism'. Sustainable ways of managing destinations can be defined by considering their competitive position and their stage in the destination life cycle in the interest of achieving sustainable tourism outcomes. This paper discusses factors that could ensure the sustainability of tourism and appropriate policy that needed to be implemented in order to prevent tourism from creating negative environmental and socio-cultural impacts in the respective tourist destinations. Within the discussion, reference is made to several tourism destinations. Towards the end of the paper, planning approaches that are needed to conserve the intrinsic qualities of selected tourism destination are suggested.*

**Keywords:** *Sustainable tourism, tourism development.*

### **PENGANTAR**

Akhir-akhir ini minat masyarakat melakukan perjalanan wisata semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal itu terjadi, karena adanya penerbangan murah yang telah membuat perjalanan wisata ke berbagai destinasi menjadi lebih mudah, murah dan terjangkau. Destinasi yang sebelumnya tidak dikenal, kini memperoleh kesempatan melakukan promosi secara lebih baik, dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Sejalan dengan itu, banyak daerah bergairah mengembangkan pariwisata, melakukan investasi, peningkatan infrastruktur untuk menarik lebih banyak wisatawan datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan dolarnya. Tujuannya hanya satu, yaitu peningkatan perolehan devisa. Di waktu yang akan datang menarik wisatawan lebih banyak berkunjung pada suatu destinasi harus ekstra

hati-hati. Kunjungan wisatawan yang banyak itu harus dilihat sebagai “madu” dan sekaligus juga dianggap sebagai “racun” bila tidak direncanakan dengan baik (*tourism can be both a blight and a blessing*). Dalam hal inilah diperlukannya perencanaan dalam pengembangan dan salah satunya adalah menggunakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Isu strategis yang mengemuka selama ini tentang struktur ruang pembangunan pariwisata, antara lain, berdasarkan hasil kajian tahun 1995 (Nuryanti, 2010) antara lain adalah: (1) Lemahnya pemahaman tentang pariwisata sebagai suatu aktivitas tidak mengenal batas administrasi (*borderless*); (2) Terjadinya tumpang tindih kewenangan pengelolaan kawasan pariwisata antara pemerintah, swasta dan daerah sendiri; (3) Rendahnya keterpaduan pengembangan kawasan pariwisata dengan

perencanaan sektor terkait; (4) Terjadinya kesenjangan pembangunan pariwisata di Bali dan di luar Bali; (5) Terjadinya *global warming* dan dampaknya terhadap destinasi pariwisata; (6) Tidak memahami *Global of Ethic For Tourism* dan implikasinya terhadap pembangunan destinasi.

## **ANALISIS KEBIJAKAN**

Pariwisata berkelanjutan sering digunakan sebagai suatu “slogan” politik untuk menganalisis kegiatan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* sendiri dapat diartikan sebagai: *tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities* (UNWTO dan UNEP, 2005). Definisi tersebut menunjukkan bahwa *sustainable tourism* memasukkan pertimbangan dampak di masa kini dan masa mendatang dalam pengembangan pariwisata. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Kimura (2011) memberikan uraiannya akan *sustainable tourism*:

*By and large, the UN World Tourism Organization (WTO) defines sustainable tourism as tourism that meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing the opportunity for the future. WTO articulates that sustainable tourism is the tourism that leads to the management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems. Sustainable tourism, in its purest sense, is an industry that attempts to make a low impact on the environment and local culture, while helping to generate income, employment, and the conservation of local ecosystems. It is a responsible tourism that is both ecologically and culturally sensitive. Thus, sustainable tourism activities have minimal impact on the environment and culture of the host community (Kimura, 2011:2).*

Agar pariwisata menjadi berkelanjutan, menuntut dilakukannya perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan di seluruh aspek pariwisata. Proses peningkatan tersebut harus dilakukan menerus dan diaplikasikan untuk semua jenis dan format wisata. Seluruh stakeholder harus terlibat dan aktif berpartisipasi dalam proses tersebut, termasuk dalam kegiatan memantau dampaknya agar dapat segera melakukan upaya preventif atau koreksi yang diperlukan. Secara lebih mendetil, UNWTO dan UNEP (2005) telah menyusun sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sustainable tourism*, yaitu:

- 1) Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen utama dari pembangunan kepariwisataan, menjaga keutuhan ekologi dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- 2) Menghargai karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisi, serta berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
- 3) Menjamin keberlanjutan usaha, menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang terdistribusikan secara merata bagi para pemangku kepentingan, termasuk berupa kesempatan kerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan, tersedianya pelayanan dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari para pemangku kepentingan serta kepemimpinan politik yang kuat untuk menjamin tercapainya partisipasi dan konsensus. Pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan membutuhkan pengamatan dampaknya secara terus menerus, serta dapat mengandung langkah-langkah preventif dan korektif jika diperlukan. Namun demikian, pariwisata berkelanjutan juga harus senantiasa menjaga kepuasan wisatawan dan memastikan bahwa

wisatawan dapat memperoleh pengalaman yang berarti dalam kunjungannya, yaitu pengalaman yang dapat meningkatkan kesadaran mereka akan isu-isu lingkungan, bahkan mendorong mereka untuk menerapkan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Di samping itu, pariwisata berkelanjutan juga harus dipahami sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan dan bukan merupakan suatu kondisi yang statis.

Secara teoritis pariwisata berkelanjutan tidak lain merupakan suatu perencanaan strategis dalam pengembangan pariwisata. Oleh karenanya menarik untuk didiskusikan, agar pembangunan pariwisata yang kita lakukan tidak melenceng dari apa yang ditetapkan oleh UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 2 menyebutkan harus memperhatikan keseimbangan, pelestarian, berkelanjutan). Pasal 6 mengamanatkan supaya memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya, alam dan kebutuhan wisatawan. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa cakupan pembangunan kepariwisataan itu meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Undang-undang mengharuskan seperti itu, tetapi apa yang terjadi di lapangan kadang kala adalah suatu kondisi yang dapat diumpamakan sebagai ‘jauh panggang dari api’.

Dampak negatif pengembangan destinasi pariwisata dapat dilihat dari gejala-gejala yang timbul pada hampir semua destinasi seperti contoh di bawah ini:

(a) Terjadinya pengrusakan lingkungan dan pencemaran terhadap seni dan budaya, dan itu terjadi cenderung sebagai akibat kebijakan yang tidak tepat. Campur tangan pemerintah memerlukan seperangkat tindakan, namun terbentur keterbatasan SDM yang kurang memahami atau memiliki kompetensi dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata. Di Bandung misalnya, Dago Teahouse sebagai sarana pertunjukan kesenian tradisional yang dibangun oleh

pemerintah, kurang dimanfaatkan dengan optimal, bahkan cenderung menurun kondisinya.

- (b) Pengembangan pariwisata yang salah urus juga terjadi di Padang. Semua orang mengetahui legenda Malin Kundang. Sekarang situs Malin Kundang sudah tercemar berat dan sekaligus tidak akan memiliki daya tarik lagi, akibat kebijakan pengelolaan yang tidak profesional. Mobil-mobil dibiarkan memasuki bibir pantai dimana situs Malin Kundang berada. Selain itu, pedagang mendirikan warungnya di atas situs yang menjadi daya tarik wisata itu. Pengelola dan para pedagang tidak menyadari, bila situs itu hancur atau hilang, daya tarik wisata untuk berkunjung tidak ada lagi, akhirnya sumber penghasilan mereka juga akan hilang. Pada kasus ini, dinas terkait tampaknya tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik.
- (c) Adanya pembangunan yang berpotensi mengganggu proses pelestarian situs warisan budaya seperti warisan budaya Candi Borobudur, dan situs Majapahit di Trowulan.
- (d) Banyaknya izin pertambangan di kawasan hutan lindung, menyebabkan perkembangan *Niche Tourism* atau *Special Interest Tourism* mengalami gangguan, karena dapat menguras sumber-sumber hayati, flora dan fauna yang tentunya menimbulkan kerugian pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Frans Mardi Hartanto (1997) mengatakan: “Dampak negatif pariwisata itu cukup luas”. Dampak yang timbul, karena tidak adanya perencanaan yang baik, kurangnya pemahaman tentang kegiatan pariwisata dan pentingnya pelestarian lingkungan. Di sinilah pentingnya perencanaan pembangunan pariwisata dilakukan secara terarah, terpadu, antar sektor dalam suatu wilayah sesuai dengan peruntukannya.

Dalam menanggulangi dampak negatif itu, sebaiknya diperhitungkan daya dukung sosial budaya dan aspek fisiknya. Pemilihan kebijakan pemerintah hendaknya diarahkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif supaya terciptanya manfaat yang merata bagi semua pihak yang berkepentingan (Nuryanti, 2010).

### **TUJUAN PERENCANAAN**

Tujuan perencanaan dalam pengembangan pariwisata di antaranya adalah : (1) Memberi arah; (2) Membimbing kerjasama; (3) Menciptakan koordinasi; (4) Menjamin tercapainya kemajuan; (5) Untuk memperkecil resiko; (6) Mendorong pelaksanaan kerja (Yoeti, 2008 : 50). Dalam seminar “Pembaruan Penataan Ruang Untuk Perbaikan Hidup di Daerah Dengan Pendekatan Kepariwisata,” Wiendu Nuryanti (2010) memberi rincian tujuan perencanaan pengembangan pariwisata secara lebih luas sebagai berikut: (1) Memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap sumber daya pariwisata yang dimiliki, sehingga dengan demikian diharapkan pariwisata dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan, memiliki daya saing bagi pembangunan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Mengatur peran setiap *stakeholders* terkait yang lintas sektor itu agar dapat mendorong pengembangan destinasi pariwisata secara bersinergis dan terpadu. Secara keseluruhan perencanaan itu dituangkan dalam Rencana Induk (*Master Plan*) Pembangunan Kepariwisata, antara lain mencakup: (a) peruntukan tata ruang; (b) produk (daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas penunjang); (c) Pemasaran; (d) SDM dan kelembagaan; (e) Investasi; (f) Lingkungan; dan (g) strategi implementasi dalam pelaksanaan program.

Tingkat-tingkat perencanaan, dapat dimulai dari Master Plan tingkat nasional, tingkat provinsi (regional), tingkat kabupaten/kota

(local), dan kemudian diikuti perencanaan Master Plan Kawasan dimana dibicarakan *detail engineering* kawasan hingga pembangunan konstruksinya. Tujuannya jelas untuk memberikan arahan pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan yang ada (dari sisi produk, pasar, tata ruang, SDM, manajemen dan sebagainya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan).

Selama ini struktur ruang wilayah pembangunan kepariwisataan cenderung berorientasi pada pengelompokan wilayah pengembangan berdasarkan karakteristik geografis. Cara ini kurang dan tidak mempertimbangkan: (1) faktor-faktor strategis lain seperti pola kunjungan wisatawan, keterkaitan antar wilayah, antar komponen kepariwisataan dan keterpaduan dengan rencana sektor lain yang juga harus diperhitungkan; (2) Ada kecenderungan memisahkan wilayah-wilayah pengembangan tanpa mempertimbangkan pola interaksi antar wilayah pengembangan kegiatan kepariwisataan yang tidak mengenal batas wilayah administrasi (*borderless*); (3) Tidak menunjukkan adanya focus pengembangan, dan hanya menggambarkan pengembangan secara makro tanpa memperhatikan pengembangan mikro yang lebih spesifik (Nuryanti, 2010).

Kebijakan pengembangan pariwisata yang baik hendaknya tercermin dalam beberapa kebijakan sebagai berikut (Hartanto, 1997):

- (1) Harus melibatkan masyarakat setempat, dasar pemikirannya adalah kebijakan kegiatan pariwisata hanya dapat dipertahankan apabila kegiatan pariwisata sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal.
- (2) Pembangunan pariwisata harus merupakan hasil usaha bersama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memberi kemudahan untuk berperan serta bagi ketiga pihak dalam proyek yang akan dibangun.

- (3) Harus fleksibel, artinya kebijakan yang dibuat hendaknya disesuaikan dengan tantangan kondisi lingkungan yang selalu berubah, karena itu kebijakan yang diambil hendaknya dapat mengakomodasi kebutuhan pihak industri pariwisata, pemerintah dan kepentingan wisatawan yang berkunjung pada destinasi.
- (4) Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan, maksudnya mereka yang kena peraturan hendaknya berhak untuk menentukan pilihannya. Dalam kegiatan usaha kepariwisataan, peraturan yang dibuat jangan terkesan menghambat dalam usaha meningkatkan kegiatan pariwisata.

Tujuan penataan ruang dalam wilayah secara nasional adalah (1) untuk memperoleh ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; (2) Untuk mencapai keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (3) Menciptakan keterpaduan perencanaan antara tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota; (4) Untuk mencapai keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka NKRI; (5) Untuk keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (7) Keseimbangan dan keserasian pertembangan antar wilayah; (8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan (9) Pertahanan dan keamanan Negara yang dinamis serta integrasi nasional (UU No 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang).

## **PENDEKATAN PERENCANAAN**

Indeks daya saing destinasi pariwisata Indonesia dapat dirinci menjadi sebelas hal, yaitu: (1) Dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, atau persepsi masyarakat terhadap pariwisata, disamping dampak ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat; (2) Terhadap harga, yang dapat menimbulkan inflasi/indek harga konsumen; (3) Prasarana/asesibilitas, bandara, pelabuhan, jalan dan jembatan; (4) Sarana dan fasilitas yang dapat dilihat dari jumlah resort dan hotel berbintang, jumlah *tour operator*, angkutan wisata; (5) Jumlah situs yang punah, pelestarian senibudaya, kualitas produk dan munculnya industry kreatif; (6) Lingkungan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah emisi CO<sub>2</sub>, Jumlah Flora dan fauna langka yang dapat diinventarisasi; (7) Teknologi, tingkat penggunaan internet, telepon/handphone; (8) SDM Pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata; (9) Regulasi kebijakan, persyaratan visa, kemudahan berinvestasi dan keringan pajak; (10) Sosial, seperti indeks pembangunan manusia, jumlah pembaca surat kabar, jumlah pendengar radio/penonton TV (Indeks Daya Saing Versi WEF/WTTC).

Menurut hasil penelitian *UN-WTO*, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada peringkat 13 di Asia Pasifik, lebih rendah dibanding dengan Malaysia (7), Thailand (10) dan Brunei (11), jauh tertinggal dari Hongkong (2) dan Singapura (1). Hal itu disebabkan karena masih banyak kelemahan pada faktor-faktor sebagai berikut: (i) *Regulatory framework: policy rules and regulations, Environmental sustainability, Safety and Security, Health and hygiene*; (ii) *Business environment and infrastructure, air and ground transport infrastructure, tourism infrastructure and price competitiveness in the T & T industry*; (iii) *Human, Cultural and*

*Natural Resources: human resources, education and training, availability of qualified labor, affinity for Travel & Tourism, natural resources, cultural resources (T & T Tourism Competitiveness Index/BAPPENAS, 2011).* Perencanaan pariwisata ke depan, hendaknya memperhatikan titik kelemahan yang ada, tanpa memperhatikan kondisi yang tengah berjalan.

### **Pariwisata sebagai instrumen strategis**

Pariwisata itu katalisator pembangunan (*agent of development*). Pariwisata, bila dikembangkan dengan baik akan memberikan *effect multiplier* cukup besar bagi tumbuhnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian, ia menciptakan mata rantai yang panjang, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di kawasan Pasifik dan Timur Jauh, berdasarkan penelitian oleh Harry G. Clement (1959) pada Yoeti (2008) besarnya nilai koefisien multiplier sebesar  $K = 3,48$ . Artinya, setiap \$1 yang dibelanjakan wisatawan, setelah dolar itu beredar dari satu tangan ke tangan orang lain, melalui beberapa kali transaksi dalam periode satu tahun, maka \$ 1 yang dibelanjakan wisatawan itu akan memberi pengaruh terhadap perekonomian makro sebesar \$ 3,48. Bayangkan, kalau wisatawan membelanjakan dolarnya sebesar \$ 8 juta, hitung saja dampaknya terhadap perekonomian makro (Yoeti, 2008). Suatu bukti nyata, pariwisata sebagai instrumen strategis bagi pembangunan daerah.

Pariwisata memiliki keterkaitan lintas sector (*multidimension*), ini memberi peluang untuk investasi dalam banyak hal. Satu hal harus disadari bahwa adanya sistem keterkaitan antara unsur-unsur industri pariwisata (hotel, restoran, *airline*, biro perjalanan, obyek dan atraksi wisata dan toko cendramata), semuanya ini menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak dan

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karenanya, wisatawan harus didorong membeli paket wisata untuk datang berkunjung pada suatu destinasi karena pariwisata memiliki karakter produk yang unik, berbeda dengan karakter produk manufaktur yang biasa kita kenal. Wisatawan harus datang sendiri ke lokasi untuk mengkonsumsi produk yang dibelinya. Karakter produk yang unik ini disebut dengan istilah "*in situ*", artinya, untuk menikmati apa yang dibelinya, wisatawan harus datang sendiri ke lokasi dimana produk itu dihasilkan. Datang berkunjungnya wisatawan ke daerah-daerah terpencil memberi peluang sangat besar bagi pembangunan daerah, dan sekaligus membuka isolasi yang terjadi selama ini.

### **PENUTUP**

Pariwisata tidak mungkin dikembangkan secara tambal sulam, tanpa arah dan tujuan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi tindakan dan melibatkan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata hendaknya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengambil kebijakan pembangunan harus melihat pariwisata sebagai salah satu pilihan pembangunan ekonomi dan setara dengan kegiatan ekonomi lainnya.
- b) Informasi kepariwisataan yang relevan harus menjadi dasar bagi pemberian izin, analisa dan pemantauan industri pariwisata yang berkaitan dengan sektor ekonomi lainnya.
- c) Pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kelemahan selama ini, komitmen kebersamaan itu tidak ada, koordinasi lemah, tidak ada panutan dan masing-masing sektor lebih

bersifat egosentris, akhirnya pengembangan pariwisata terkesan jalan sendiri-sendiri. Bila dibiarkan terus seperti ini, fungsi pariwisata sebagai *agent of development* akan sia-sia, apalagi menjadi unsur strategis dalam pembangunan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Armida S. 2011. *Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Menunjang Pariwisata Daerah*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Darsoprajitno, H. Soewarno. 2002. *Ekologi Pariwisata: Tata Laksana Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata*, Bandung: Penerbit PT. Angkasa.
- Gardner, William C. 1996. *Tourism Development: Principles, Processes and Policies*, Von Nostrand Reinhold, New York, Madrid and Singapore: International Thomson Publishing Inc.
- Hartanto, Frans Mardi. 1997. *Menjelang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Perspektif Perencanaan Kebijakan/Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*, Bandung: Penerbit ITB.
- Kimura, Hirosune. 2011. *Tourism, Sustainable Tourism and Ecotourism in Developing Countries*. Paper for ANDA International Conference, Nagoya : Graduate School of International Development, Nagoya University
- Kozak, Metin. 2004. *Destination Benchmarking: Concepts, Practices and Operations*, Walingford, Oxon: CABI Publishing.
- Mak, James. 2004. *Tourism & The Economy: Understanding The Economic of Tourism*, Hawaii: University of Hawaii Press Book
- Nuryanti, Wiendu. 2010. *Pembaruan Penataan Ruang Untuk Perbaikan Kualitas Hidup Di Daerah Dengan Pendekatan Kepariwisataan*, Paper Rapat Kerja Nasional IA-ITB, Yogyakarta.
- Sujas, Winarno. 2010. *Kebijakan Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia Berdaya Saing*, Paper Seminar Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta.
- Suhardy, Harry. 2013. *Studi Kelayakan Destinasi Pariwisata*, Diktat Perkuliahan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta.
- UNWTO dan UNEP. 2005. *Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers*
- UNWTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development For Tourism Destinations*, Madrid: WTO
- UU No 6 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
- UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia
- Vabhove, Norbert. 2005. *The Economic of Tourism Destinations*, Butterworth, Heinemann, Amsterdam and New York: Elsevier
- Wahab, Salah dan John J. Pigram. 1997. *Tourism Development and Growth: The Challenge of Sustainability*, London and New York: Roulledge
- Yoeti, Oka A. 1977. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka A. 1999. *Ekowisata: Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Perca
- Yoeti, Oka A. 2005. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

